

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA APOTEK  
ZAHRAH**

***THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS  
FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTITIES (SAK EMKM) AT  
ZAHRAH PHARMACY***

Debiana Soga<sup>1</sup>, Erna Kurniawati<sup>2</sup>, Christian Pangkerego<sup>3</sup>

Politeknik Saint Paul Sorong

<sup>1</sup>debianasoga@gmail.com, <sup>2</sup>ernakurniawatih@gmail.com, <sup>3</sup>Christianpangkerego12@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Apotek Zahrah sebagai salah satu bisnis mikro dalam sektor farmasi. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pencatatan keuangan di Apotek Zahrah masih dilakukan dengan cara manual dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kendala utama yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum diterapkannya sistem pencatatan digital. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan akuntansi dasar, penggunaan aplikasi keuangan sederhana, serta pendampingan secara berkala. Penerapan SAK EMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, mempermudah akses pembiayaan, serta mendukung keberlangsungan usaha mikro.

**Kata kunci:** SAK EMKM, laporan keuangan, UMKM, Apotek Zahrah, pencatatan manual

**Abstract**

*This research seeks to evaluate the degree of adoption of the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) at Zahrah Pharmacy, a micro enterprise within the pharmaceutical industry. The study uses a descriptive qualitative approach, applying data gathering methods like interviews, observation, and documentation. The results show that Zahrah Pharmacy still performs financial record-keeping manually and hasn't yet met the relevant accounting standards. The key challenges noted consist of insufficient accounting knowledge, inadequate human resources, and the lack of a digital recording system. This research suggests fundamental accounting education, the implementation of straightforward financial software, and continuous guidance. The execution of SAK EMKM aims to enhance the quality of financial reports, ease access to funding, and promote the sustainability of micro businesses.*

**Keywords:** SAK EMKM, financial statements, MSMEs, Zahrah Pharmacy, manual recording.

**1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan berbasis mikro yang biasanya berhadapan dengan keterbatasan modal dan kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, perusahaan berbasis mikro dapat

mengatur dan mengelola pencatatan keuangan, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan investasi yang strategis guna mendukung kemajuan usaha. Tanpa pengelolaan keuangan yang efisien, perusahaan berbasis mikro mengalami masalah likuiditas, kesalahan dalam penempatan dana, serta risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang pencatatan keuangan, perencanaan anggaran, serta pengelolaan utang dan aset menjadi hal yang sangat krusial agar perusahaan berbasis mikro dapat bertahan dan tumbuh dalam usaha yang semakin kompetitif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam ekonomi negara, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya yang mengandalkan sektor ini untuk perkembangan ekonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai usaha yang produktif dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 miliar atau omzet tahunan hingga Rp250 miliar. Pemerintah memberikan dukungan UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mempermudah perizinan, akses finansial, dan pendampingan agar UMKM lebih kompetitif. Namun, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, terutama dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

Menurut penelitian OCBC Indonesia pada Business Fitness Index 2023, ada 80% perusahaan di Indonesia masih menggunakan pencatatan manual. Lebih dari 70% UMKM pada sektor farmasi di Papua Barat Daya masih menggunakan pencatatan manual, yang menghambat akses ke pendanaan dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat.

Apotek Zahrah adalah salah satu bisnis mikro kesehatan yang menghadapi masalah serupa. Apotek ini masih mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara sederhana, yang dapat mengakibatkan kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan laporan keuangan yang tidak akurat. Ketidakstabilan arus kas, kesalahan dalam perhitungan profit, dan kesulitan mendapatkan pinjaman modal adalah semua hasil dari keputusan bisnis yang didasarkan pada data yang salah. Oleh karena itu, Apotek Zahrah menjadi studi kasus yang tepat untuk menilai penerapan sistem pencatatan keuangan yang lebih efisien untuk usaha skala kecil di industri farmasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

SAK EMKM pertama kali dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 sebagai pedoman akuntansi yang ditujukan khusus bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan agar UMKM lebih gampang dalam melakukan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan kehandalan laporan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya standar ini, UMKM tidak perlu mengadopsi standar akuntansi yang rumit seperti SAK ETAP atau PSAK, sehingga lebih mudah untuk diterapkan sesuai dengan kapasitas bisnis dalam perusahaan. Walaupun SAK EMKM sudah resmi diimplementasikan, masih terdapat banyak UMKM yang belum menerapkannya dalam pengelolaan catatan keuangan. Banyak pelaku bisnis yang masih menerapkan pencatatan sederhana yang hanya mencakup catatan kas masuk dan keluar, tanpa menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan sesuai dengan standar. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman tentang akuntansi, terbatasnya staf yang berpendidikan akuntansi, dan pandangan bahwa penyusunan laporan keuangan yang menyeluruh tidak begitu penting selama bisnis masih memperoleh keuntungan.

Penerapan SAK EMKM menawarkan sejumlah keuntungan bagi UMKM, seperti akses pendanaan yang lebih mudah berkat laporan keuangan yang transparan dan lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, peningkatan akurasi dalam penilaian kinerja usaha melalui pencatatan yang teratur, serta kepatuhan terhadap peraturan yang membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan akuntansi dan perpajakan. Selain itu, standar ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan dan menyederhanakan pengelolaan bisnis, serta

memperkuat daya saing usaha sebab laporan keuangan yang lebih profesional mempermudah UMKM dalam menjalin kerjasama dengan investor, mitra bisnis, dan memperluas pangsa pasar.

Meskipun SAK EMKM telah diterbitkan sejak 2018, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan pemilik UMKM tentang standar ini, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan tenaga kerja yang berkompeten di bidang akuntansi. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan SAK EMKM di UMKM, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ini.

Berdasarkan standar ini, laporan keuangan UMKM terdiri dari tiga bagian utama:

1. Laporan Posisi Keuangan: Menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada periode tertentu.
2. Laporan Laba Rugi: Menunjukkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi selama periode akuntansi tertentu.
3. Catatan atas Laporan Keuangan: Memberikan penjelasan tambahan tentang laporan keuangan yang disajikan.

Untuk Apotek Zahrah, penerapan SAK EMKM sangat penting untuk memperbaiki mutu pencatatan keuangan dan meningkatkan transparansi finansial usaha. Dengan mengimplementasikan SAK EMKM, Apotek Zahrah dapat mempunyai beberapa keuntungan seperti:

1. Akses Pendanaan yang Lebih Mudah: Laporan keuangan yang dibuat sesuai SAK EMKM sebaiknya diakui oleh perbankan juga institusi keuangan, sehingga memudahkan dalam mendapatkan pinjaman modal.
2. Penilaian Kinerja Keuangan yang Lebih Tepat: Melalui sistem pencatatan yang lebih berkesinambungan, pengusaha apotek mampu mengawasi keadaan keuangan usaha secara langsung maupun membuat keputusan yang lebih akurat.
3. Mematuhi Regulasi: Mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan IAI akan membantu apotek memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, UMKM dengan pencatatan yang lebih sederhana, seperti Apotek Zahrah, lebih tepat menggunakan SAK EMKM karena lebih mudah diterapkan dibandingkan standar akuntansi lainnya. Standar ini memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih mudah serta masih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

Melalui penerapan SAK EMKM, Apotek Zahrah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih informatif maupun terpercaya, karena itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan strategis, memenuhi kriteria perbankan atau calon investor, serta meningkatkan kredibilitas usaha di hadapan pemangku kepentingan. Namun, implementasi SAK EMKM juga terkendala oleh tantangan, seperti minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai standar akuntansi di antara pengelola apotek. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang cukup agar pengelola apotek dapat memahami serta mengimplementasi SAK EMKM dengan tepat.

Studi ini bermaksud dalam menganalisis bagaimana penerapan SAK EMKM dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan apotek serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Sehingga, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan pawasan serta praktik akuntansi yang tepat bagi usaha mikro di sektor farmasi, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami tingkat penerapan SAK EMKM pada UMKM serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya.
2. Menganalisis tingkat pemahaman dan penerapan SAK EMKM oleh UMKM.
3. Mengidentifikasi kendala yang menghambat UMKM dalam menerapkan SAK EMKM.
4. Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM oleh UMKM.

## 2. TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

### Dasar Teori

Salah satu pengertian akuntansi yang dirumuskan oleh Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada tahun 1970 adalah sebagai berikut: *“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative courses of action.”*

Jadi, APB dan AICPA menjelaskan pengertian akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan jasa, yang fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan. Selain itu, dapat diketahui akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, pengumpulan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam membuat keputusan. Berdasarkan *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi demi memberikan penilaian dan keputusan yang tepat dan jelas bagi pengguna informasi itu. Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2018), akuntansi berperan sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dari sejumlah definisi yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk memproses pengumpulan, pencatatan, analisis, serta penyajian informasi keuangan yang relevan serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Fungsi utama akuntansi, sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah menyajikan informasi keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keputusan yang tepat. Akuntansi juga bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan, dipahami, dan transparan sesuai dengan standar yang berlaku seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di samping itu, akuntansi berperan dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh badan keuangan dan perpajakan di Indonesia.

Fungsi utama akuntansi, menurut Buku Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdiri dari:

1. Pencatatan dan Pengukuran: Mencatat semua transaksi keuangan secara teratur dan menilai pengaruhnya terhadap keadaan keuangan entitas.
2. Pelaporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab.
3. Pengelolaan Keuangan: Mendukung manajemen dalam memantau aliran kas, aset, dan kewajiban perusahaan supaya dapat diatur dengan efektif.
4. Penyediaan Data untuk Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi keuangan yang tepat bagi pihak terkait guna mendukung keputusan ekonomi dan bisnis.
5. Kepatuhan pada Aturan: Menjamin bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan pajak yang relevan.
6. Menyediakan data keuangan yang tepat dan jernih bagi para pemangku kepentingan guna meningkatkan pengambilan keputusan ekonomi.
7. Mendukung perencanaan strategis dan pengawasan keuangan untuk meningkatkan efisiensi serta profitabilitas perusahaan.

8. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau IFRS (International Financial Reporting Standards).
9. Menjamin ketaatan terhadap peraturan dan pajak untuk menghindari risiko hukum serta denda finansial.
10. Menilai dan mengukur kinerja finansial melalui analisis laporan keuangan, perbandingan antar periode, dan rasio keuangan.

Kondisi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu dapat dilihat dalam laporan keuangan. Laporan ini lebih dari sekadar angka di atas kertas; itu menunjukkan cara bisnis mengelola sumber daya, menghasilkan keuntungan (*profitability*), dan bertahan dalam persaingan. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan strategis (*strategic decision-making*) karena memiliki informasi yang akurat dan terorganisir.

Beberapa pakar berpendapat mengenai laporan keuangan. Munawir (2010) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang menggambarkan keadaan finansial suatu perusahaan pada waktu tertentu dan hasil operasionalnya selama periode tertentu. Harahap (2015) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama periode akuntansi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan adalah alat utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang keadaan keuangan dan kinerja operasionalnya kepada pihak luar, seperti investor dan kreditor, menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018).

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, menurut International Financial Reporting Standards (IFRS), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas sebuah entitas untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga berperan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi bagi manajemen dalam mengatur sumber daya perusahaan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) merancang SAK EMKM untuk mempermudah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangannya. Ini didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena dianggap terlalu rumit dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, dibutuhkan standar akuntansi yang lebih mudah dan relevan bagi UMKM. SAK EMKM dibuat untuk mendukung UMKM dalam bertransisi dari pencatatan yang sederhana ke pelaporan yang berbasis akrual, serta menjadi landasan dalam mengadopsi standar yang lebih komprehensif di masa mendatang sejalan dengan pertumbuhan usaha dan kompleksitas transaksinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 29 ayat 1 mengharuskan lembaga keuangan mikro untuk melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, SAK EMKM dirancang dengan beberapa prinsip inti, yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi yang sudah berlaku.
2. Menggambarkan kemajuan terbaru dalam kegiatan operasional dan transaksi entitas secara umum.
3. Menyatukan prinsip akuntansi dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan, kompleksitas transaksi, dan ukuran perusahaan.
4. Berdasarkan pada efisiensi biaya.

SAK EMKM dirancang khusus untuk digunakan oleh entitas EMKM. Meskipun defines EMKM bervariasi di berbagai lembaga, DSAK telah menyelaraskan pemahamannya agar sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM, dalam ketentuan yang mengatur UMKM merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan telah diubah sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kriteria modal usaha sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga dengan maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk lahan dan gedung usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanpa menghitung tanah dan bangunan tempat usaha.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah pedoman akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna diterapkan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang melakukan transaksi keuangan sederhana dan tidak memiliki tingkat akuntabilitas publik yang besar. SAK EMKM diperkenalkan pada tahun 2016 dengan tujuan memberikan pedoman kepada UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih mudah, relevan, dan terpercaya. Sasaran dari SAK EMKM adalah menawarkan standar yang lebih mudah bagi entitas kecil untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat untuk berbagai tujuan, seperti memperoleh pendanaan dari bank atau investor, serta memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fungsi utama SAK EMKM meliputi:

1. Mempermudah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan untuk entitas kecil dan menengah.
2. Menyediakan informasi keuangan yang tepat dan dapat dipercaya bagi pengguna laporan keuangan, seperti pemilik bisnis, pemberi pinjaman, dan pihak regulasi.
3. Memfasilitasi entitas mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang diterima.
4. Menggalakkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan UMKM.
5. Memfasilitasi proses perpajakan dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ada sejumlah perbedaan utama antara SAK EMKM dan standar akuntansi lain yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

Tabel 1. 1 Perbedaan SAK EMKM dan SAK UMUM (SAK EP)

Jenis Standar	Karakteristik Utama
<b>SAK EMKM</b>	standar yang paling dasar, ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki tanggung jawab publik. Titik berat pada pengelolaan keuangan dasar melalui tiga laporan utama.
<b>PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)</b>	Standar akuntansi yang mengikuti IFRS (International Financial Reporting Standards) dan diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik yang tinggi, seperti perusahaan publik atau yang berfokus pada pasar global.
<b>SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)</b>	Standar yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, namun lebih kompleks dibandingkan SAK EMKM karena mencakup lebih banyak elemen akuntansi, seperti aset tetap dan instrumen keuangan.
<b>SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik)</b>	Diterapkan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, seperti perusahaan terbuka, BUMN, dan institusi keuangan, dengan standar yang lebih rumit dan mendetail dibandingkan PSAK.

Sumber : Buku Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Edisi 2

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM adalah standar yang paling mudah dan ditujukan untuk UMKM yang memiliki pencatatan keuangan yang minimal. Sebaliknya, PSAK diterapkan oleh entitas besar yang memiliki tanggung jawab publik yang signifikan, sementara SAK ETAP berada di antara SAK EMKM dan PSAK dengan lingkup yang lebih luas namun tidak sekompleks PSAK. SAK EMKM mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang sesuai untuk kebutuhan UMKM.

Dalam akuntansi terdapat 2 dasar yang umum digunakan untuk mencatat terjadinya suatu kejadian. transaksi ialah dasar kas dan dasar akrual. Dasar kas merupakan teknik pengarsipan. akuntansi yang mengakui terjadinya transaksi ketika uang tunai atau setara kas diterima dan dianjurkan. Basis akrual merupakan metode akuntansi yang mengakui dampak dari transaksi. dan kejadian lainnya selama transaksi dan peristiwa tersebut berlangsung tanpa memperhatikan pada saat uang itu diterima atau dikeluarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari metode kas dasar umumnya mencakup kas dan aset pemilik, sementara laporan Keuangan yang diperoleh melalui metode akrual basis mengakui adanya tagihan dan utang (rahayu, 2015).

SAK EMKM menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam Dasar akrual menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas membuat laporan keuangan dengan menerapkan basis akrual. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan Beban diakui saat memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dari tiap akun. DSAK IAI memutuskan untuk menjaga agar asumsi dasar tersebut tetap konsisten. dengan dasar asumsi yang diterapkan dalam SAK lainnya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual akan menghasilkan informasi yang lebih merefleksikan dengan akurat situasi dan kegiatan usaha entitas selama dan pada akhir dari suatu periode pelaporan yang memudahkan pengguna laporan keuangan.

Entitas memiliki potensi untuk meneruskan kegiatan usahanya di masa yang akan datang. (keberlangsungan usaha) Entitas yang memiliki kesinambungan usaha kecuali jika manajemen bertujuan untuk melikuidasi atau menghentikan kegiatan atau tidak memiliki realistik alternatif kecuali melaksanakan hal-hal itu. Jika entitas tidak merakit laporan keuangan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha, maka entitas menyampaikan alasan mengapa entitas tidak memiliki kesinambungan usaha.

Konsep entitas bisnis merujuk pada saat entitas tersebut berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan yang terpisah. Konsep entitas usaha ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui apakah entitas mengalami kemajuan atau malah sebaliknya. SAK EMKM (IAI, 2016) menggambarkan konsep entitas bisnis sebagai salah satu anggapan dasar. Agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, entitas harus mampu membedakan harta pribadi pemilik dari aset dan pendapatan usaha. entitas itu. DSAK IAI menegaskan bahwa jika entitas tidak memenuhi dasar asumsi dari konsep entitas bisnis.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengacu pada laporan keuangan agar dapat digunakan secara efektif, laporan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang sehat; Ketidakpastian yang tak dapat dihindari mencakup berbagai kejadian dan situasi yang dimengerti melalui pengungkapan karakteristik dan penjabaran kejadian dan situasi tersebut serta dengan menggunakan penilaian yang rasional dalam menyusun laporan finansial. Pertimbangan yang baik mengandung unsur-unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang ada perlu dilaksanakan dalam situasi ketidakpastian, agar aset atau pendapatan tidak ditampilkan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak ditampilkan lebih tidak tinggi. Dengan demikian, penggunaan pertimbangan yang baik tidak diperkenankan. pembentukan aset atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan tanggung jawab atau beban yang perlu lebih besar. Inti dari semua itu adalah Pertimbangan yang bijaksana tidak membolehkan adanya bias.
2. Relevan (*Relevance*); PSAK Kerangka Konseptual Paragraf 2.4: Data yang disediakan dalam laporan keuangan wajib bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi, mencakup ramalan kinerja di masa depan serta penilaian hasil dari keputusan ekonomi yang telah diambil sebelumnya.

3. Dapat Dipahami (*Understandability*); PSAK Kerangka Konseptual Paragraf 2.32: Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan format yang jelas agar dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai bisnis dan ekonomi. Informasi yang sangat rumit perlu dijelaskan lebih mendalam dalam catatan pada laporan keuangan.
4. Dapat Diandalkan (*Faithful Representation*); PSAK Kerangka Konseptual Paragraf 2.12: Informasi yang disampaikan harus tidak mengandung kesalahan material dan bersifat tidak bias. Informasi yang digunakan harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji dan mengikuti prinsip akuntansi yang diakui secara umum. Data yang digunakan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya diterima.
5. Dapat dibandingkan (*Comparability*); PSAK Kerangka Konseptual Paragraf 2.24: Laporan keuangan perlu disusun secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, agar pengguna dapat melakukan analisis tren kinerja keuangan suatu entitas.
6. Kelengkapan; Laporan harus komprehensif dalam batasan agar dapat dipercaya. Kesengajaan yang tidak diungkapkan dapat membuat data tidak akurat atau menyesatkan, menjadikannya tidak dapat diandalkan dan tidak memadai jika dilihat dari segi adanya.
7. Substansi Mengungguli Bentuk; Transaksi, kejadian dan keadaan lainnya dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi dan kenyataan ekonomi serta bukan sekadar bentuk hukumnya. Ini merupakan meningkatkan tantangan laporan keuangan.
8. Materialitas; Informasi dianggap material jika ada kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan. Dalam mencatat keberadaan informasi itu dapat memengaruhi adanya pengambilan keputusan ekonomi konsumen yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan. Materialitas bergantung pada signifikansi item atau kesalahan yang dinilai berdasarkan konteks. Beberapa kelalaian dalam mencantumkan (penghilangan) atau kesalahan dalam melaksanakan pencatatan (kesalahan pernyataan). Dengan cara yang sama, tidak benar untuk membuat atau mengizinkan penyimpangan yang tidak material dari SAK dalam hal kesalahan EMKM jika mencapai suatu hasil dalam penyajian tertentu dari aspek keuangan, kinerja keuangan atau aliran kas sebuah entitas.
9. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat; Keuntungan dari informasi seharusnya lebih besar daripada biaya untuk menyediakannya. Namun, penilaian biaya dan keuntungan dari adanya pertimbangan yang substansial. Biaya juga tidak perlu ada dibebankan kepada pengguna yang merasakan keuntungan. Keberadaan evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus menyadari adanya keuntungan informasi juga mungkin dinikmati oleh pihak luar. SAK EMKM (2016) EMKM bertujuan untuk memastikan penyajian tertentu dari posisi keuangan dan kinerja yang dicapai keuangan ataupun aliran kas suatu entitas. Tepat Waktu (*Timeliness*); PSAK Kerangka Konseptual Paragraf 2.33: Informasi keuangan perlu disajikan pada waktu yang sesuai agar tetap berguna untuk proses pengambilan keputusan. Keterlambatan dalam memberikan laporan dapat mengurangi nilai dari informasi yang disampaikan.

SAK EMKM menetapkan bahwa laporan keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

Laporan posisi keuangan (neraca) dalam SAK EMKM menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Unsur utama dalam laporan posisi keuangan adalah:

1. Aset; Sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas dan memberikan keuntungan ekonomi di masa yang akan datang. Aset terbagi menjadi:
  - a) Aset Lancar; Aset yang diantisipasi akan dimanfaatkan atau diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun, seperti kas, piutang dagang, dan inventaris.
  - b) Aset Tidak Lancar; Aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, seperti lahan, gedung, dan peralatan.
2. Liabilitas; Kewajiban suatu entitas yang muncul akibat peristiwa sebelumnya dan pelunasannya menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dibagi menjadi:

- a) Liabilitas Jangka Pendek; Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti utang dagang dan biaya yang belum dibayar.
- b) Kewajiban Jangka Panjang; Utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun, contohnya pinjaman bank jangka panjang.
3. Ekuitas; Hak sisa atas aset setelah dikurangi semua kewajiban, termasuk modal pemilik dan keuntungan yang tidak dibagikan.

Laporan laba rugi yang ada dalam SAK EMKM menggambarkan kinerja finansial entitas pada suatu periode tertentu. Elemen utama dalam laporan pendapatan dan pengeluaran mencakup:

- a) Pendapatan; Uang yang didapatkan dari kegiatan utama suatu entitas, seperti menjual barang atau layanan. Pendapatan bisa dikelompokkan menjadi:
  - b) Pendapatan Operasional; Pemasukan dari kegiatan inti perusahaan.
  - c) Pendapatan Non-Operasional; Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan di luar aktivitas inti bisnis, seperti pendapatan dari bunga.
- d) Beban: Biaya yang timbul dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnis. Beban dibagi menjadi;
  - Beban Operasional: Pengeluaran yang diperlukan untuk aktivitas utama perusahaan, seperti biaya bahan dan gaji pegawai.
  - Beban Non-Operasional: Pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti kerugian dari penjualan aset tetap.
- e) Laba atau Rugi Bersih; Perbedaan antara pemasukan dan biaya yang menetapkan rentabilitas bisnis dalam suatu masa. Apabila pendapatan melebihi beban, maka entitas meraih keuntungan, sedangkan jika beban melebihi pendapatan, maka entitas mengalami kerugian.

Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai pencapaian usaha dan efektivitas operasional entitas dalam periode tertentu, yang sangat krusial bagi pemilik usaha untuk menilai kinerja bisnis.

Catatan pada laporan keuangan menyajikan keterangan tambahan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai laporan keuangan yang disajikan. Beberapa poin signifikan dalam catatan terhadap laporan keuangan mencakup:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan; Menguraikan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk cara penilaian persediaan dan pengakuan pendapatan.
2. Informasi tambahan tentang elemen-elemen dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi; Menyediakan penjelasan lebih lanjut mengenai bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya.
3. Data mengenai kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya yang berhubungan; Menyampaikan kewajiban yang mungkin ada dan dapat mempengaruhi keadaan finansial entitas di masa yang akan datang.
4. Transaksi dengan pihak yang berhubungan; Menyampaikan transaksi yang dilakukan dengan individu atau entitas yang memiliki ikatan khusus dengan organisasi, seperti pemilik atau afiliasinya.
5. Catatan pada laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memahami kebijakan akuntansi yang digunakan dan memberikan informasi tambahan yang mendukung transparansi keuangan dari entitas.

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016), pengakuan elemen laporan keuangan adalah proses membuat posisi dalam laporan neraca atau laba rugi yang memenuhi kriteria elemen tertentu, yang dijelaskan dalam Paragraf 2.2 dan 2.8 dan memenuhi kriteria berikut.

Pengakuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dapat diprediksi bahwa keuntungan ekonomi masa depan yang terkait dengan posisi tersebut akan masuk atau keluar dari organisasi. Penilaian tingkat ketidakpastian yang terkait dengan arus keuntungan ekonomi

di masa depan dilakukan berdasarkan bukti yang berkaitan dengan situasi yang ada pada penutupan periode laporan saat penyusunan laporan finansial. Penilaian tersebut dilakukan secara pribadi.

a. Keandalan Pengukuran

Pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur secara akurat. Dalam sejumlah situasi, biaya suatu item dapat diukur dengan akurat. Dalam situasi lain, biaya itu perlu diakumulasikan. Apabila pengukuran yang sesuai tidak dapat dilakukan, sehingga pos tersebut tidak diakui dan tidak dimuat dalam laporan neraca atau laporan penghasilan.

SAK EMKM (IAI, 2016) menjelaskan pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset

IAI dalam SAK EMKM (2018:6) menyatakan bahwa Aset diakui dalam laporan neraca ketika keuntungan ekonominya di masa depan Dapat dipastikan akan mengalir ke dalam aset dan entitas tersebut memiliki. Biaya yang dapat diukur dengan akurat. Aset tidak diidentifikasi dalam laporan posisi. keuangan jika keuntungan ekonominya dianggap tidak mungkin mengalir ke dalam entitas meskipun pengeluaran telah dilakukan. Sebagai pilihan lain, Transaksi itu menyebabkan pengakuan biaya dalam laporan laba rugi.

2) Liabilitas

IAI dalam SAK EMKM (2018:6) menyatakan bahwa kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika alokasi sumber daya yang mengandung keuntungan ekonomi yang dijamin akan dilaksanakan untuk menyelesaikan tanggung jawab entitas serta jumlah yang perlu diselesaikan dapat diukur dengan akurat.

3) Pendapatan

IAI dalam SAK EMKM (2018:6) menyatakan bahwa penerimaan diakui dalam laporan laba rugi apabila ada peningkatan manfaat ekonomi di masa depan yang berhubungan dengan peningkatan aset atau pengurangan liabilitas telah terjadi dan bisa diukur dengan tepat.

4) Beban

IAI dalam SAK EMKM (2018:6) menguraikan bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan nilai manfaat ekonomi di masa mendatang yang terkait dengan pengurangan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan akurat.

5) Saling Hapus

Dalam kasus di mana kegiatan rutin entitas tidak melibatkan pembelian dan penjualan aset tetap, entitas harus melaporkan laba dan rugi dari pelepasan aset tetap dengan mengurangi nilai tercatat aset permanen dan biaya penjualan yang terkait. Dalam kasus lain, penghapusan saling terkait antara aset dan kewajiban atau pendapatan dan pengeluaran dilarang oleh SAK EMKM.

Berdasarkan IAI dalam SAK EMKM (2018:5), pengukuran merupakan suatu proses penentuan jumlah dana untuk mengakui aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran elemen laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya masa lalu. Biaya historis dari suatu aset adalah jumlah uang tunai atau yang setara dengan uang tunai yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset itu pada waktu perolehannya. Biaya historis sebuah liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima, atau jumlah kas yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk memenuhi liabilitas dalam kegiatan usaha yang normal. Kendala dalam pengukuran yang diuraikan oleh IAI dalam SAK EMKM (2018:5) menyatakan bahwa syarat kedua untuk mengakui suatu pos adalah adanya biaya yang bisa diukur dengan terpercaya. Dalam sejumlah situasi, biaya suatu item dapat diukur dengan akurat. Dalam situasi lain, biaya itu perlu diperkirakan. Jika pengukuran yang tepat tidak dapat dilakukan, maka pos tersebut tidak akan diakui dan tidak akan ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:7) mengatur penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Penyajian Wajar

Penyajian yang wajar adalah suatu keharusan jujur mengenai efek transaksi, peristiwa, dan situasi lain. Ini berlaku untuk definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, entitas harus menyajikan data untuk mencapai tujuan.

- a) Relevan; pengguna dapat menggunakan data untuk proses pengambilan keputusan.
  - b) Representasi akurat; berarti bahwa informasi disampaikan dengan tepat atau dengan cara yang seharusnya dilakukan, dan tidak mengandung kesalahan atau bias yang signifikan.
  - c) Keterbandingan; data dalam laporan keuangan suatu entitas dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengenali tren posisi dan kinerja finansial. Data dalam laporan keuangan suatu entitas juga dapat dibandingkan dengan entitas lain untuk menilai posisi dan kinerja keuangan.
  - d) Keterpahaman; data yang disampaikan dapat dengan gampang dimengerti oleh pemakai. Pengguna dianggap memiliki pemahaman yang cukup dan minat untuk mempelajari informasi itu dengan usaha yang wajar.
2. Kepatuhan terhadap SAK EMKM IAI menurut SAK EMKM (2018:7) Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM harus menyatakan secara eksplisit dan tanpa kecuali mengenai kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan laporan keuangan. Entitas tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, kecuali laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan dalam SAK EMKM.
  3. Penyajian yang Konsisten Penyajian serta pengklasifikasian akun-akun dalam laporan keuangan antara periode entitas dilakukan secara konsisten, kecuali;
    - 1) Telah terjadi perubahan penting pada sifat operasi entitas, modifikasi estimasi, dan kesalahan dalam pencatatan.
    - 2) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian
  4. Informasi yang Lengkap Laporan keuangan minimum terdiri dari:
    - 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
    - 2) Laporan laba rugi selama periode
    - 3) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Selain itu, laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) istilah yang mengacu pada usaha yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), UMKM didefinisikan sebagai entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan dan memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM ditujukan untuk memberikan arahan kepada UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang mudah namun tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Usaha Mikro merupakan bentuk kegiatan produktif yang dimiliki serta dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha Kecil mengacu pada kegiatan ekonomi yang beroperasi secara independen, dikelola oleh individu atau entitas yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar. Usaha ini tidak dimiliki, dikelola, atau menjadi bagian dari usaha yang lebih besar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan usaha yang bersifat produktif dan dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha secara mandiri, tanpa berstatus sebagai anak perusahaan atau

cabang dari usaha kecil maupun besar. Kegiatan ini memiliki total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kriteria untuk UMKM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diubah menjadi PP No. 7 Tahun 2021 kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan omzet tahunan adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro;
  - a) Modal usaha maksimal sebesar Rp 1 Miliar (tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha).
  - b) Pendapatan tahunan tertinggi Rp 2 Miliar.
  - c) Jumlah maksimum karyawan adalah 10 orang.
2. Usaha Kecil;
  - a) Modal usaha berkisar antara Rp 1 Miliar sampai Rp 5 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha).
  - b) Pendapatan tahunan berkisar antara Rp 2 Miliar sampai Rp 15 Miliar.
  - c) Jumlah pekerja berkisar antara 10 sampai 100 orang.
3. Usaha Menengah;
  - a) Modal untuk usaha berkisar antara Rp 5 Miliar sampai Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
  - b) Pendapatan tahunan berkisar antara Rp 15 Miliar sampai Rp 50 Miliar.
  - c) Jumlah pegawai melebihi 100 orang.

Menurut Saifudin Sarief, yang dikutip oleh M. Azrul Tanjung (2017), usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai beberapa ciri utama.

1. Ciri-ciri usaha mikro mencakup;
  - 1) Belum melakukan pencatatan keuangan secara terencana, termasuk pembuatan neraca usaha.
  - 2) Mayoritas pelaku usaha umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah (setara SD) dan belum mengembangkan jiwa kewirausahaan yang kokoh.
  - 3) Memiliki ketergantungan lebih pada rentenir atau tengkulak daripada pada perbankan.
  - 4) Tidak memiliki izin usaha atau dokumen legal seperti NPWP.
  - 5) Merekrut kurang dari empat pegawai.
  - 6) Perputaran bisnis yang cepat dengan daya serap modal yang tinggi, serta mampu bertahan meskipun dalam situasi krisis ekonomi berkat rendahnya biaya manajemen.
  - 7) Memiliki karakter yang ulet, simpel, dan siap menerima arahan dengan metode yang sesuai.
2. Ciri-ciri usaha kecil mencakup;
  - 1) Sudah menerapkan pengelolaan keuangan, dengan memisahkan keuangan bisnis dan pribadi serta menyusun neraca sederhana.
  - 2) Memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, dengan rata-rata pendidikan setidaknya SMA serta pengalaman dalam berbisnis.
  - 3) Sudah memiliki izin usaha dan dokumen legal, termasuk NPWP.
  - 4) Sudah mulai terhubung dengan sektor perbankan, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menyusun rencana bisnis, analisis kelayakan, dan pengajuan pinjaman.
  - 5) Mempekerjakan antara 5 sampai 19 pegawai.
3. Ciri-ciri usaha menengah;
  - 1) Memiliki pengelolaan dan organisasi yang lebih teratur dengan penugasan yang jelas dalam bidang keuangan, pemasaran, dan produksi.
  - 2) Mengimplementasikan sistem akuntansi yang teratur, memudahkan proses audit dan pemeriksaan, termasuk oleh lembaga perbankan.
  - 3) Mengatur tenaga kerja secara efektif, bergabung dalam organisasi buruh, serta menawarkan program Jamsostek dan pelayanan kesehatan.

- 4) Memenuhi semua syarat hukum, seperti izin operasional, NPWP, izin lingkungan, dan lain-lain.
- 5) Aktif menjalin kemitraan dan memanfaatkan layanan pembiayaan perbankan.
- 6) SDM yang lebih baik dengan merekrut lulusan sebagai manajer.

Berbagai faktor yang memengaruhi implementasi SAK EMKM dalam usaha kecil di bidang apotek/farmasi meliputi:

1. Pemahaman dan Kesadaran Pemilik Usaha; Banyak pemilik usaha kecil belum sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi standar akuntansi, sehingga mereka masih menggunakan metode pencatatan yang sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia; Terbatasnya jumlah akuntan yang berkualitas menjadi hambatan utama dalam penerapan SAK EMKM.
3. Dukungan Teknologi; Masih ada apotek yang menerapkan sistem manual, sehingga efisiensinya dalam pencatatan keuangan berkurang.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam usaha kecil, terutama di bidang apotek atau farmasi, telah menarik perhatian sejumlah penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak usaha kecil di sektor ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan karena keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti penerapan laporan keuangan di UMKM. Warsadi, Herawati, dan Julianto (2017) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Studi yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa minimnya implementasi SAK EMKM di sektor UMKM disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Ismadewi, Herawati, dan Atmaja (2017) menunjukkan minimnya kesadaran UMKM mengenai signifikansi akuntansi, yang berpengaruh pada ketidakcocokan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lestari dan Wulandari (2020) menemukan beberapa faktor yang menghalangi penerapan SAK EMKM pada UMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya, dan masalah teknis, terutama dalam aspek pelatihan dan pemahaman akuntansi. Sementara itu, Wibowo dan Setiawan (2019) mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan metode pencatatan manual dan sederhana, tanpa mengikuti prinsip akuntansi yang relevan, sehingga belum dapat membuat laporan keuangan yang memenuhi standar.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dengan cara mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian. Metode ini lebih fokus pada pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena ketimbang hanya mengukur variabel-variabel angka. Salah satu pendekatan dalam metode kualitatif adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfokus untuk menyajikan penjelasan yang mendetail dan teratur tentang suatu fenomena dengan dasar data yang diambil dari wawancara, pengamatan, atau arsip.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena yang terlihat, tetapi juga menganalisisnya secara rinci untuk memahami arti yang terdapat di dalamnya. Metode ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan standar yang berlaku dalam pencatatan keuangan secara manual di apotek kecil. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menyoroti analisis deskriptif mengenai praktik pencatatan keuangan untuk dilakukan maupun kecocokannya dengan standar yang ada.

Studi ini dilaksanakan di Apotek Zahrah yang berlokasi di Jalan. A.M Sangaji, KM 12 Masuk. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Studi ini mengkaji mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) melalui metode pencatatan manual pada Apotek. Sebuah bisnis kecil di bidang farmasi yang menjadi subjek penelitian. Apotek ini dipilih sebagai tempat penelitian karena masih menerapkan sistem pencatatan keuangan secara manual. Subjek yang diteliti mencakup:

1. Pemilik Apotek Zahrah.
2. Staff yang mengurus pencatatan keuangan.
3. Dokumen keuangan yang dipakai dalam pembukuan.

Studi ini dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan, dari 25 Maret 2025 hingga 25 Mei 2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, sehingga menekankan analisis mendalam mengenai informasi non-numerik, seperti hasil wawancara, catatan laporan, dan referensi dari buku serta sumber tertulis lainnya. Data ini menjadi tujuan utama dalam pengembangan analisis, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pola, serta pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data Sekunder berupa sumber informasi berasal dari dokumen tertulis atau dokumen internal serta catatan resmi perusahaan, yang meliputi data primer dan data sekunder yang telah diolah sebelumnya. Informasi tersebut berisi penjelasan tentang profil serta riwayat singkat Apotek Zahrah. Agar data yang diperoleh akurat dan menyeluruh, Kajian ini mengimplementasikan berbagai metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi : Observasi dilakukan secara langsung di Apotek Zahrah untuk mengerti cara pelaksanaan pencatatan keuangan manual dalam aktivitas operasional harian. Peneliti memperhatikan proses pencatatan transaksi mulai dari penjualan, pembelian, sampai penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap peralatan atau media yang dipakai dalam pencatatan, seperti buku kas atau aplikasi sederhana yang digunakan untuk pencatatan manual.
2. Wawancara : Wawancara dilakukan dengan pemilik apotek untuk memahami kebijakan yang diterapkan dalam pencatatan keuangan serta tantangan yang dihadapi. Staf apotek yang mengurus pencatatan transaksi juga diwawancarai untuk memahami cara pencatatan dilakukan, termasuk tantangan teknis atau kesulitan yang mereka hadapi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan penjelajahan lebih dalam terhadap jawaban yang diberikan oleh partisipan.
3. Dokumentasi : Studi dokumen dilakukan dengan memeriksa berbagai laporan keuangan yang telah disiapkan oleh Apotek Zahrah, termasuk catatan transaksi, buku kas, laporan laba rugi, serta dokumen lain yang relevan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keakuratan pencatatan dan membandingkannya dengan standar yang ada. Dokumen ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan yang bisa diperbaiki.

Studi ini menggunakan Data yang didapat dianalisis melalui metode kualitatif deskriptif dengan tahapan sebagai berikut; pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses penerapan SAK EMKM secara sederhana di Apotek Zahrah. Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama:

1. Pengumpulan dan Analisis Dokumen Keuangan  
Peneliti mengumpulkan dokumen seperti nota penjualan dan pembelian, buku kas, inventaris, serta laporan pengeluaran rutin. Selain itu, dilakukan observasi dan wawancara dengan pemilik dan staf apotek untuk memahami praktik akuntansi yang diterapkan.
2. Perbandingan terhadap Standar SAK EMKM  
Data dianalisis dan dibandingkan dengan standar SAK EMKM, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, serta pencatatan aset dan penyusutannya.

### 3. Identifikasi Masalah dan Pemberian Saran

Peneliti mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman akuntansi, pencatatan yang tidak teratur, dan belum digunakannya sistem digital. Berdasarkan temuan tersebut, disusun saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAK EMKM ke depannya.

### 3. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Zahrah masih memakai metode pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM. Pencatatan transaksi keuangan hanya mencakup transaksi harian dan dilakukan secara manual, tanpa adanya laporan keuangan yang komprehensif dan terstruktur. Selain ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan belum teratur, sehingga menyulitkan untuk membuat laporan keuangan yang tepat.

Apotek Zahrah sampai saat ini belum pernah membuat laporan keuangan resmi, disebabkan oleh kurangnya tenaga yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Selain itu, minimnya kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan juga menjadi penyebab lambatnya penerapan SAK EMKM secara menyeluruh. Laporan keuangan sering kali dipandang sebagai tambahan belaka dan bukan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak diutamakan dalam manajemen usaha.

Berdasarkan SAK EMKM dikembangkan untuk mendukung UMKM dalam menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi.
2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca),
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dokumen-dokumen ini dapat disusun berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari kegiatan keuangan Apotek Zahrah, baik melalui wawancara maupun dokumentasi transaksi yang ada. Ketiga laporan itu dapat mulai disusun secara bertahap berdasarkan data transaksi yang telah tersedia di Apotek Zahrah. Penyusunan laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen catatan transaksi harian, serta informasi dari wawancara langsung dengan pemilik dan pengelola Apotek Zahrah. Berikut adalah laporan keuangan dari Apotek Zahrah.

Adapun hasil penerapan dari SAK EMKM pada Apotek Zahrah sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan
1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai jumlah pendapatan (income) yang diterima serta semua biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan sebuah bisnis untuk memperoleh keuntungan (profit) atau mengalami kerugian (loss). Dengan laporan ini, pemilik usaha dapat mengevaluasi usaha yang dikelola mampu memperoleh keuntungan, atau mengalami kerugian, serta dari sumber mana pendapatan dan biaya tersebut berasal. Laporan laba rugi umumnya disusun secara teratur, baik setiap bulan, kuartal, ataupun tahunan, agar pemilik atau manajemen dapat menilai secara berkala kinerja usaha mereka. Laporan laba rugi menyajikan informasi penting bagi pemilik Apotek Zahrah dalam mengambil keputusan, seperti merumuskan strategi penjualan, efisiensi biaya, atau kebutuhan penyesuaian harga jual. Laporan laba rugi berfungsi bukan hanya sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai landasan analisis keuangan bagi pihak internal dan eksternal. Untuk pemilik Apotek Zahrah, laporan ini berfungsi untuk mengenali pola pendapatan dan pengeluaran dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui apakah strategi bisnis yang diterapkan sudah berhasil atau masih memerlukan perbaikan. Di samping itu, laporan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar seperti investor, kreditor, atau lembaga perpajakan, karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dan menjaga keberlangsungan operasionalnya. Berikut adalah laporan laba dan rugi Apotek Zahrah untuk Periode Triwulan IV tahun 2024.

**Tabel 3.1 Laporan Laba Rugi Apotek Zahrah**

<b>APOTEK ZAHRAH</b>		
Laporan Laba Rugi Per Triwulan IV 2024		
<b>Pendapatan:</b>		
Penjualan		Rp 73,938,000.00
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 39,261,206.00</u>
<b>Laba Kotor</b>		<b>Rp 34,676,794.00</b>
<b>Beban:</b>		
Beban Gaji	Rp 12,000,000.00	
Beban Listrik	Rp 900,000.00	
Beban Peny. Peralatan	Rp 562,500.00	
Beban. Peny. Bangunan	Rp 875,000.00	
Beban. Peny. Ruangan	<u>Rp 312,500.00</u>	
<b>Total Beban</b>		<b><u>Rp 14,650,000.00</u></b>
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp 20,026,794.00</b>

Sumber : Data Yang Diolah (Tahun 2024)

**1. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai keadaan keuangan bagi entitas pada periode tertentu, meliputi akun seperti kas, aset tetap, dan ekuitas. Dalam penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), tidak ada urutan atau format standar yang ditetapkan untuk penyajian akun aset tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas. Dalam penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), tidak ada urutan atau format tetap yang harus diikuti dalam menyusun laporan posisi keuangan.

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Apotek Zahrah untuk periode Triwulan IV tahun 2024.

**Tabel 3.2 Laporan Posisi Keuangan Apotek Zahrah**

<b>APOTEK ZAHRAH</b>			
Laporan Posisi Keuangan Per Triwulan IV 2024			
<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
<b>Aktiva Lancar:</b>			
Kas	Rp 145,990,959.00		
Persediaan Akhir	<u>Rp 5,785,835.00</u>		
	Rp 151,776,794.00		
<b>Aktiva Tetap:</b>			
Peralatan	Rp 45,000,000.00	Modal	Rp 200,000,000.00
Akm. Peny. Peralatan	Rp 562,500.00	Laba Bersih	Rp 25,276,794.00
Bangunan	Rp 70,000,000.00		
Akm. Peny. Bangunan	Rp 875,000.00		
Ruangan	Rp 25,000,000.00		
Akm. Peny. Ruangan	Rp 312,500.00		
Akm. Peny. Tahun sebelumnya	<u>Rp 64,750,000.00</u>		
<b>Total Aktiva Tetap:</b>	<b>Rp 73,500,000.00</b>		
<b>Total Aktiva:</b>	<b>Rp 225,276,794.00</b>	<b>Total Pasiva:</b>	<b>Rp 225,276,794.00</b>

Sumber : Data Yang Diolah (Tahun 2024)

## 2. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) pembuatan catatan atas laporan keuangan tidak harus rumit, tetapi tetap harus menyertakan informasi yang relevan, terpercaya, dan mudah dipahami oleh pemilik usaha serta pihak-pihak yang berkepentingan. Unsur yang penting meliputi: informasi umum tentang entitas, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta landasan pembuatan laporan keuangan. Catatan dalam laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, transparansi, dan alasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pemilik serta pengguna lainnya. Berikut adalah catatan atas laporan keuangan Apotek Zahrah untuk periode triwulan tahun 2024.

**Tabel 3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Apotek Zahrah Catatan Atas Laporan Keuangan Per Triwulan 2024	
<b>4.3.1 UMUM</b>	Entitas apotek Zahrah ini berada di Kota Sorong, didirikan pada tahun 2018, dengan alamat di Jl. A.M. Sangaji KM.12 Papua Barat Daya. Entitas Apotek Zahrah ini beroperasi di bidang Kefarmasian yang menjual obat-obatan. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021.
<b>4.3.2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
<b>a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK EMKM</b>	Laporan keuangan disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM).
<b>b. Dasar penyusunan laporan keuangan</b>	Dasar pembuatan laporan keuangan adalah penerapan asumsi dasar akrual. Pencatatan laporan keuangan yang disajikan hanya mencakup kas, modal, peralatan dan data transaksi saja.
<b>c. Aset Tetap</b>	Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan nilai residu.
<b>d. Pengakuan Pendapatan dan Beban</b>	Pendapatan dari hasil penjualan obat-obatan dan praktek kesehatan diakui pada saat transaksi penjualan berlangsung. Di sisi lain, beban diakui pada saat terjadinya.
<b>e. Kewajiban</b>	Tidak terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Apotek Zahrah.

Sumber : Data Yang Diolah (Tahun 2024)

## 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan SAK EMKM di Apotek Zahrah, dapat dinyatakan bahwa:

1. Apotek Zahrah masih menggunakan metode pencatatan yang sederhana dan belum sepenuhnya mematuhi standar akuntansi yang berlaku.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi tiga komponen utama SAK EMKM, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Berbagai tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi, tidak adanya tenaga akuntansi yang berkompeten, serta sistem pencatatan digital yang belum diterapkan.
4. Meskipun sistem yang ada masih sederhana, Apotek Zahrah memiliki kesempatan untuk memperbaiki pencatatannya seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan dan pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan.
5. Dengan memahami dan belajar tentang penerapan SAK EMKM, dapat memberikan banyak manfaat, termasuk memperjelas kondisi keuangan dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan temuan penelitian dan berbagai tantangan yang telah dihadapi dalam penerapan SAK EMKM di Apotek Zahrah, penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengelola Apotek Zahrah sebaiknya mengikuti pelatihan terkait dasar-dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan yang tepat.
2. Disarankan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah, seperti Buku Kas atau software, Akuntansi UKM, supaya proses pencatatan menjadi lebih teratur dan otomatis.
3. Diperlukan bantuan dari ahli akuntansi atau organisasi yang relevan, seperti dosen atau akuntan publik, agar proses transisi dapat dilakukan secara bertahap dan efektif.
4. Apotek Zahrah sebaiknya memisahkan keuangan pribadi pemilik dari dana usaha untuk memastikan laporan keuangan merefleksikan kondisi usaha yang sesungguhnya.
5. Penting untuk menjaga konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan mencatat transaksi secara rutin, baik harian maupun mingguan, untuk menghindari kehilangan data dan memastikan keakuratan laporan yang akurat.

**Daftar Pustaka**

- [1] Brigham, F. Fagene dan Houston. 2012. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: IAI.
- [3] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. PSAK No. 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- [4] Efendi, F. N. A. 2019. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FITALOKA STUDIO DI MOJOKERTO, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fitaloka Studio Di Mojokerto. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
- [7] Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [8] Prabowo, H. 2019. Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Pencatatan Keuangan Usaha Kecil. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(2), 123-135.
- [9] Sari, R. 2020. Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro dan Kecil. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(1), 45-60.